

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Sinar Grafika.p
- Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Awan Y. Abodellah dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- E. Utrecht, 2013, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh. Saleh Djindang, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Edi Suharto, 2020, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cet. 5. Bandung: CV Alfabeta.
- Erlyn Indriani. 2016. *Hukum Administrasi Negara: Antara Norma dan Realita*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Fernando M. Manullang. 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- H.R. Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien, cet. 6, Bandung: Nusa Media.
- Indroharto. 2017. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Implikasinya dalam Hukum Administrasi*. Refika Aditama: Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2020. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress: Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing: Malang.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2019, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- J. Supranto. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

- Larry N. Gerston. 2002. *Public Policy Making: Process and Principles*. M.E. Sharpe: Armonk, NY.
- M. Irfan Islamy, 2014, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat dan Ilmu Penelitian*. Mandar Maju: Bandung.
- Maria Farida Indrati. 2016. *Ilmu Perundang-undangan*. Edisi Revisi. Kanisius: Jakarta.
- Muchsan. 2004. *Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- P.M. Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana: Jakarta.
- Rezza Munawir, 2021, *Pemantauan Implementasi Kebijakan Tingkat Komponen dalam Negei (TKDN) pada Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR*. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Jakarta.
- Riant Nugroho. 2014. *Public Policy: Analisis Kebijakan, Proses, Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Said Zainal Abidin. 2021. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Samudra Wibawa. 2012. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sholichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Borobudur Press (Jakarta: Borobudur Press).
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Soeharto Prawiro. 2018. *Ekonomi Industri dan Kebijakan TKDN*. Penerbit ITB: Bandung.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

———, 2010, *Hukum Acara: Mengenai Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta.

Thomas R. Dye. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.

Yance Arizona. 2018. *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis Sosio-Legal*. Obor Indonesia: Jakarta.

Zainal Arifin Hoesein, 2014, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Yogyakarta, FH UGM Press.

Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.

B. Jurnal

Abdullah, H. (2014). Realokasi kebijakan fiskal: implikasi peningkatan human capital dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 117-128.

Darmada, D. (2022). Mengupas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(2), 97-107.

Giovannus, D. (2020). Pengaturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau local content requirements di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(01), hlm. 81-107.

Mahardhika, Guruh, Khairani, dan Muhammad Hasbi. "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi." *Nagari Law Review* X, no. X (April 2020): 1-9.

Patarai, M. I. (2021). Desentralisasi kebijakan dalam otonomi daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406-1417.

Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat*, 10(1), 2022, hlm. 83-84.

Sofyanoor, A. (2022). Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sibatik Journal*, 1(2), 21-30.

Wibowo, M. A., Hatmoko, J. U. D., & Satria, G. (2024). Implikasi Integrasi BIM dan ERP Terhadap Pengendalian Volume Pekerjaan Proyek: Studi Kasus Proyek Bendungan. *TEKNIK*, 45(1), hlm. 128-138.

Zulfia, I. H., Endrawan, G., Rosika, C., Syamsi, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi kebijakan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja organisasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur mekanisme dan persyaratan terkait penerapan TKDN dalam kontrak kerja pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR memberikan arahan teknis dalam implementasi TKDN

Keputusan Menteri PUPR Nomor 280/KPTS/M/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian PUPR

Keputusan Menteri PUPR Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR

Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

D. Internet dan Bahan Lainnya

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2024). BPK Ungkap Temuan Penting dalam LHP DTT Penyelenggaraan Jalan Tol Kementerian PUPR. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-temuan-penting-dalam-lhp-ddt-penyelenggaraan-jalan-tol-kementerian-pupr?> dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.
- Bappenas, Evaluasi Implementasi TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: Bappenas, 2021.
- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, "PERMEN PUPR NO. 20 / 2016 Membawa Perubahan Peran Balai Di Ditjen Bina Konstruksi," <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/permen-pupr-no-20-2016-membawa-perubahan-peran-balai-di-ditjen-bina-konstruksi/>, diakses pada 1 Mei 2025
- Gunarto, Marcus Priyo. 2008. Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Indonesia.go.id. "Mendongkrak Daya Saing lewat Sertifikasi TKDN." Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6829/mendongkrak-daya-saing-lewat-sertifikasi-tkdn> dikunjungi pada tanggal 15 April 2025, pukul 11.00 WIB.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2024). BBWS Pomjen Menerima Sertifikat Verifikasi TKDN pada Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar. <https://sda.pu.go.id/balai/bbwspompenganjeneberang/bbws-pomjen-menerima-sertifikat-verifikasi-tkdn-pada-pembangunan-bendungan-pamukkulu-kabupaten-takalar?> dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Kementerian PUPR. hlm. 6.
- Kementerian PUPR, Strategi Implementasi TKDN dalam Sektor Konstruksi Infrastruktur, Jakarta: Kementerian PUPR, 2022.
- Kementerian Perindustrian RI, Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (2021), hlm. 12.
- Kementerian Perindustrian. "TKDN Definition, Benefits, and The Calculations Types." Sucofindo.co.id. (Juli 2023). <https://www.sucofindo.co.id/en/articles/general/inspection-audit-services-en-21/tkdn-definition-benefits-and-the-calculations-types/> Diakses 15 April 2025 pukul 10.30 WIB

- Parmohonan, S. (2014). Pengaruh implementasi kebijakan kependudukan dan kualitas pelayanan masyarakat terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan KTP Elektronik pada kantor catatan sipil Bekasi Selatan. Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), hlm. 43.
- Ratna Sari Dewi, Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum> dikunjungi pada 15 Januari 2025 pukul 10.00 WIB
- Rezza Munawir, “Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR”, <https://insight.brantas-abipraya.co.id/blog/artikel-3/pemantauan-dan-evaluasi-penerapan-kebijakan-tingkat-komponen-dalam-negeri-tkdn-pada-proyek-infrastruktur-kementerian-pupr-99>, dikunjungi tanggal 14 Januari 2025 pukul 10.30 WIB.
- Tim Hukum Online, Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya <https://res.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya> dikunjungi pada 15 Januari 2025 pukul 10.00 WIB
- Website Berita Kementerian Keuangan, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mamuju/id/data-publikasi/berita-terbaru/2900-peningkatan-penggunaan-produksi-dalam-negeri-p3dn.html> dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB.

